

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2005)
- Asshiddiqie, Jimly, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, (Jakarta: Konpress, 2005)
- Fadjar, Abdul Mukhtie, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006)
- Haris, Syamsudin, *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998)
- Huda, Ni'matul, *Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta: UII Press, 2018)
- MD, Moh. Mahfud, *Perdebatan Hukum Tata Negara*, (Jakarta: LP3S, 2007)
- Siahaan, Maruarar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Soemantri, Sri, *Hak Menguji Material di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1986)
- Susanto, Anthon F., *Ilmu Hukum Non Sistematis Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010)
- Tim Penyusun, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010)

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Jurnal

- Adji, A. B., Mau, H. A., & Candra, M. "Konstitusionalitas Perubahan Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Dalam Negara Hukum Demokrasi", SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, Vol. 3, No. 1, 2024
- Ajie, Radita, "Open Legal Policy Peraturan Perundang-Undangan Bidang Politik Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi," Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13, No. 2, 2016
- Darmawan, Dwiky Arief, "Teori Opened Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023," Gorontalo Law Review, No. 1, 2024
- Kansil, C. S., & Nadilatasya, P. M. "Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Dinamika Politik dan Kepercayaan Publik di Indonesia: Analisis Implikasi Hukum dan Etika", UNES Law Review, Vol. 6, No. 4, 2024
- Keenan D. Kmiec, "The Origin and Current Meanings of Judicial Activism", California Law Review, Vol. 92, No. 5, 2004
- "Konsep Open Legal Policy Perlu Dikoreksi," Jurnal Mahkamah Konstitusi, 2015
- Lutfil Ansori, "Telaah Terhadap Presidential Threshold Dalam Pemilu Serentak 2019", Jurnal Yuridis, Vol. 4, No. 1, 2017
- Nur'aini, "Politik Hukum Larangan Pengunduran Diri Anggota Komisi Pemilihan Umum", Jurnal Cita Hukum, Vo. 2, No. 1, 2013
- Pan Muhammad Faiz Kusuma Wijaya. "Dimensi Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi", Jurnal Konstitusi, Vol. 13, No. 2, 2016
- Satriawan, Iwan dan Tanto Lailam, "Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang", Jurnal Konstitusi, Vol. 16, No. 3, 2019
- Shidarta, "Cherry-Picking Jurisprudence dalam Putusan Pengadilan", Business Law Binus Review, 2023
- Wibowo, Mardian, "Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang- Undang", Jurnal Konstitusi, Vol. 12 No. 2, 2015
- Wicaksana Dramanda, "Menggagas Penerapan Judicial Restraint di Mahkamah Konstitusi", Jurnal Konstitusi, Vol. 11, No. 4, 2014

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-III/2005 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor Putusan Nomor 34/PUU-XIV/2016 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XVII/2020 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIX/2021 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Website

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&menu=5>.
Diakses pada 4 Januari 2025

LAMPIRAN I
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIV/2016

LAMPIRAN II

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023